

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENYUSUNAN PETA PELUANG INVESTASI DALAM
MENDUKUNG PENCAPAIAN REALISASI INVESTASI DI INDONESIA
(STUDI DI KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA)**

**Muhammad Khoirul Anwar^{1(a)}, Sri Yunanto^{2(b)}, Dini Gandini Purbaningrum^{3(c)},
Reza Rizkynata^{4(d)}**

*^{1,2,3,4}Jurusan Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
^{a)}m.khoirulanwar@umj.ac.id*

**INFORMASI
ARTIKEL**

ABSTRAK

Article History:

Dikirim:
30-01-2023
Diterbitkan Online:
30-06-2023

Kata Kunci:

Peta Peluang Investasi, Pra-
Fisibility Study, Efektivitas,
Realisasi Investasi

Keywords:

*Investment Opportunity Map
(PPI), Pre-Fisibility Study
(Pre-FS/Feasibility Study),
Effectiveness, Investment
Realization*

Corresponding Author:

m.khoirulanwar@umj.ac.id

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 menunjukkan angka yang positif, yakni 3,69% yoi. Pertumbuhan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang mengalami kontraksi di angka minus 2,07%. Pertumbuhan ekonomi ini tentu memberikan harapan yang baik pada pertumbuhan dan pergerakan perekonomian Indonesia di tahun 2022. Salah satu strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Investasi/BKPM RI adalah Penyusunan Peta Peluang Investasi yang siap ditawarkan kepada Investor. Program ini merupakan fasilitasi Negara kepada Investor untuk menanamkan modalnya dengan telah tersedianya segala informasi yang dibutuhkan dalam bentuk kajian pra-fisibilitas (*pra-FS*). Penelitian bertujuan untuk menggambarkan efektivitas program penyusunan peta peluang investasi dalam mendukung pencapaian realisasi investasi di Indonesia pada Kementerian Investasi/BKPM RI. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang keluarannya berupa penerbitan jurnal nasional ISSN yang OJS dan Seminar nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program PPI efektif dalam meningkatkan realisasi investasi di Indonesia. Tujuh indikator yang terdiri dari Kejelasan Tujuan yang Hendak dicapai, Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan, Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap, Perencanaan yang Matang, Penyusunan Program yang Tepat, Tersedianya Sarana dan Prasarana, Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang bersifat Mendidik semuanya memperlihatkan tingkat efektivitas yang baik.

ABSTRACT

Indonesia's economic growth in 2022 shows a positive figure, namely 3.69% yoi. This growth experienced a significant increase compared to economic growth in 2020 which experienced a contraction at minus 2.07%. This economic growth certainly gives good hope for the growth and movement of the Indonesian economy in 2022. One of the strategies implemented by the Ministry of Investment/BKPM RI is the preparation of an Investment Opportunity Map that is ready to be offered to Investors. This program is State facilitation for investors to invest their capital by providing all the necessary information in the form of a pre-financial study (pre-FS). The research aims to describe the effectiveness of the program for compiling investment opportunity maps in supporting the achievement of investment realization in Indonesia at the Ministry of Investment/BKPM RI. The method used is descriptive with a qualitative approach, the output of which is the publication of the ISSN national journal OJS and national seminars. The results of this study indicate that the PPI program is effective in increasing investment realization in Indonesia. The seven indicators consisting of Clarity

of Goals to be Achieved, Clarity of Strategy for Achievement of Goals, Steady Policy Analysis and Formulation Process, Mature Planning, Proper Programming, Availability of Facilities and Infrastructure, Educational Monitoring and Control System all show a high level of effectiveness.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i2.601>

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan salah satu tugas pokok pemerintah yang buahnya adalah kemakmuran, dimana masyarakat mempunyai daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhannya. Kemampuan tersebut dampak dari terbakanya lapangan pekerjaan karena terjadi pertumbuhan (ekspansi) ekonomi sehingga masyarakat mendapatkan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas. Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 menunjukkan angka positif, yakni 3,69% yoi. Pertumbuhan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang mengalami kontraksi di angka minus 2,07%.

Pertumbuhan ekonomi ini memberikan harapan yang baik pada perekonomian Indonesia di tahun 2022. Untuk itu upaya menjaga momentum pertumbuhan tersebut harus dilakukan dengan strategi yang baik, khususnya Kementerian Investasi/ BKPM RI. Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah Penyusunan Peta Peluang Investasi yang siap ditawarkan kepada Investor. Program ini merupakan fasilitasi Negara kepada Investor berupa tersedianya informasi dalam bentuk kajian pra- *feasibility study* (pra-FS).

Program ini sudah dilaksanakan dari tahun 2020 dan dilanjutkan pada tahun anggaran 2021 dan diperkuat dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi yang disahkan tanggal 4 Mei 2021 dengan anggaran sekitar Rp 80 miliar yang tersebar dalam 6 sektor pariwisata, dan 19 proyek pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan kawasan, dan infrastruktur penunjang kawasan (https://newssetup.kontan.co.id).

Pelaksanaan program PPI ini didasari oleh; investasi merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional yang sifatnya jangka panjang; peran investasi diharapkan mampu mengatasi persoalan ketimpangan wilayah, melalui keterlibatan

dalam proses realisasi Proyek Prioritas Strategis/Major Projects (Perpres No. 18/2020), Proyek Strategis Nasional/PSN (Perpres No. 3/2016 jo. No. 109/2020), dan proyek prioritas lainnya mengacu a.l.: Sislognas (Perpres No. 26/2012), Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (PP 50/2011), percepatan pembangunan ekonomi Jatim (Perpres No. 80/2019), dan Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Perpres No. 55/2019), yang tersebar di 34 provinsi; perlu adanya informasi yang komprehensif guna membantu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi di Indonesia; dan perlunya dukungan terhadap peningkatan dan percepatan tumbuhnya investasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka tujuan dari program PPI ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan gambaran komprehensif dan mendetail dalam bentuk pra studi kelayakan (pra-FS) kepada investor dan stakeholder terkait mengenai kelayakan suatu proyek;
- 2) Menganalisis kelayakan investasi suatu proyek berdasarkan sektor yang akan didorong dan dikembangkan oleh Pemerintah 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif setiap daerah (provinsi) dalam rangka mendukung upaya pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah yang berdaya saing;
- 3) Merumuskan usulan rekomendasi kebijakan dan insentif khusus kepada Kementerian/Lembaga terkait bagi pengembangan penanaman modal proyek prioritas yang bersifat strategis di Indonesia.
- 4) Menyiapkan informasi proyek prioritas strategis berbasis spasial (Sistem Informasi Geografis) yang siap ditawarkan kepada investor dan informasi/konten terkait lainnya yang diintegrasikan dengan sistem informasi yang telah tersedia di BKPM

Permasalahannya adalah apakah program PPI ini efektif dalam mendukung pencapaian realisasi investasi di Indonesia? Adapun urgensi Teoritik dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan yang berharga dalam rangka memperkaya kajian dibidang efektivitas organisasi dan sebagai bahan rujukan bagi pengembangan penelitian berikutnya khususnya yang terkait dengan efektivitas penyusunan peta peluang Investasi yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Kota/Kabupaten. Urgensi secara praktis diantaranya adalah; untuk memberikan gambaran nyata tentang kondisi efektivitas program PPI dalam mendukung realisasi investasi di Indonesia.

Pendahuluan berisikan latar belakang penelitian yang ditulis dengan ringkas, padat, dan jelas, dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan teori-teori yang dipakai. Masing-masing item dalam pendahuluan seperti latar belakang masalah, rumusan tujuan, teori dan definisi operasional, tidak ditempatkan dalam sub-judul.

Efektivitas sebagaimana dikemukakan oleh Sedarmayanti (2001:59), yakni “Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisien meningkat”. Siagian (1978:77) mengungkapkan beberapa hal yang menjadi kriteria dalam pengukuran efektivitas yaitu:

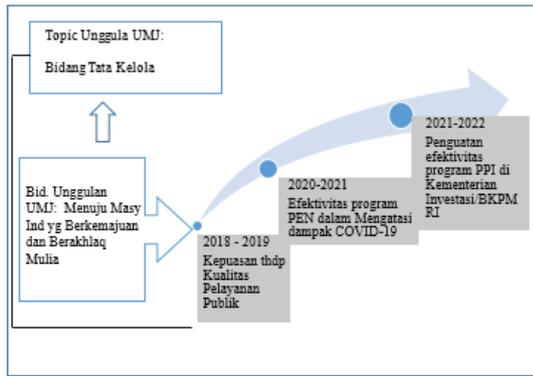
- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, 15 artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh oerorganisasi dimasa depan.
- e) Penyusunan program yang tepat. Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Untuk mengukur efektivitas program penyusunan peta peluang investasi dalam mendukung pencapaian realisasi investasi di Indonesia pada Kementerian Investasi /BKPM RI , maka akan digunakan indikator dari Gibson dalam Tangkilisan (2005;65) yaitu:

- 1) Kejelasan Tujuan yang Hendak dicapai
- 2) Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan
- 3) Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap
- 4) Perencanaan yang Matang
- 5) Penyusunan Program yang Tepat
- 6) Tersedianya Sarana dan Prasarana
- 7) Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang bersifat Mendidik

Adapun roadmap peneliti adalah memperkuat pelaksanaan program PPI di Kementerian Investasi/BKPM RI. Gambaran perjalanan dan milestone yang telah dan akan dicapai oleh peneliti dalam kurun waktu tertentu. Gambar dibawah ini menunjukkan roadmap peneliti dari tahun 2018 hingga tahun 2022.



Gambar 1. Road Map Peneliti

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang metode yang mencakup penggalan data, tempat penggalan data, populasi dan sampel, atau subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, instrumen, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 3 cara, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumentasi.

Informan yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive sampling* yang dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Maka dari itu peneliti menetapkan informan dari Kementerian Investasi/BKPM RI terdiri dari 1 (satu) orang Direktur pada Kedepuitan Perencanaan Investasi, 1 (satu) orang Staf pada kedepuitan Perencanaan Investasi, 3 orang Pengusaha (Calon Investor).

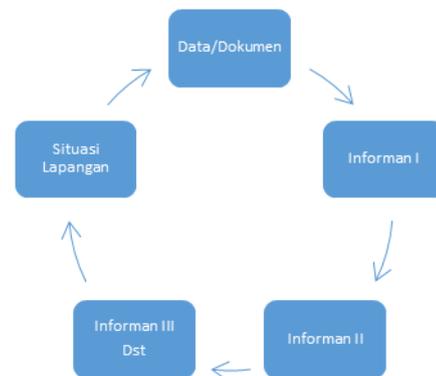
Didalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis kualitatif. Bogdan & Biklen (dalam Bungin, 2010) mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan: bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sedangkan menurut Sieddel (dalam Moleong, 2006), proses analisis data kualitatif terdiri dari :

- 1) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan.

- 2) mengumpulkan, memilah-milah, mengkasifikasikan, mensintesisikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
- 3) berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Adapun teknik analisis kualitatif yang diguna kan dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew. B. Miles dan Michael Hubermann (dalam Rohidi dan Mulyarto, 1992) dengan langkah-langkah analisis, sebagai berikut: a. Pengumpulan Data; b. Reduksi data; c. Penyajian data; d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yang dialkukan dengan gambaran sebagai berikut:



Gambar 2. Triangulasi Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat data (dalam bentuk ringkas), analisis data dan interpretasi terhadap hasil. Hasil dapat disajikan dengan tabel atau grafik untuk memperjelas hasil secara verbal, di samping penjelasan naratif. Bagian ini merupakan penjelasan yang menjawab masalah atau hipotesis penelitian.

Hasil penelitian terkait efektivitas PPI menggunakan 7 (tujuh) indicator yang akan ditampilkan dan dibahas pada tiap-tiap indikator, sebagai berikut:

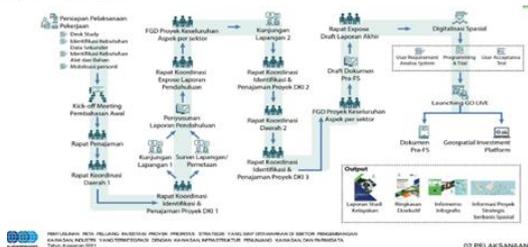
Kejelasan Tujuan yang Hendak dicapai

Indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai menunjukkan bahwa seluruh jajaran Kemeneterian Investasi/BKPM RI telah memberikan arahan yang jelas yang didasarkan pada tupoksi Kementerian maupun penugasan secara khusus dari Presiden. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Deputi

Perencanaan Penanaman Modal, Nurul Ichwan, sebagai berikut:

“Menteri telah memeberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Kemeninves/BKPM dan seluruh pemangku kepentingan yang disampaikan dalam pembukaan *kick of meeting/KOM* pada 16 Juni 2021. KOM PPI dihari oleh unsur terkait K/L, seperti BAPPENAS, Kementerian ATR/BPN, Gubernur, Bupati, Penyedia jasa dan seluruh perwakilan Tenaga Ahli. Menteri menekankan maksud tujuan PPI ini, diantaranya adalah Menyiapkan informasi proyek prioritas strategis berbasis spasial (Sistem Informasi Geografis) yang siap ditawarkan kepada investor dan informasi/konten terkait lainnya yang diintegrasikan dengan sistem informasi yang telah tersedia di BKPM. PPI merupakan fasilitas kepada Calon Investor untuk mendapatkan informasi yang jelas dan valid yang tersedia baik dalam bentuk laporan Pra-FS, info grafis dan video. Ketersediaan informasi tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sehingga calon Investor yakin bahwa investasinya tidak akan mendapatkan hambatan, tgermasuk dalam hal perizinan, kesiapan Pemerintah Daerah dan masyarakat.” (Sumber: Wawancara diolah)

Kejelasan tujuan PPI juga disampaikan oleh Direktur Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Noor Fuad terkait output, sebagai berikut: “Output PPI ini berupa Dokumen Prastudi Kelayakan; Ringkasan Eksekutif (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris); Info Memo (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris); Infografis (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris); dan Informasi proyek prioritas strategis berbasis spasial (Sistem Informasi Geografis). Selanjutnya dijelaskan nilai output dalam investasi rata-rata sebesar 15 -25 % nilai investasi. PPI tahun anggaran 2021 ini tersebar di 25 Provinsi, seperti tampak pada peta dibawah ini:



Gambar 3. Ruang Lingkup Wilayah Penyusunan Peta Peluang Investasi

Sumber: Paparan KOM PPI, 16 Juni 2021

Dari data diatas menunjukkan bahwa kejelasan tujuan PPI sudah ditekankan kepada seluruh stake holders sejak awal kegiatan dilaksanakan. Hal ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki informasi yang lengkap dan jelas sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya.

Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Strategi pencapaian tujuan PPI dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:



Gambar 4. Ruang Lingkup Wilayah Penyusunan Peta Peluang Investasi

Sumber: Paparan KOM PPI, 16 Juni 2021

Alur pekerjaan yang sudah ditetapkan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan PPI untuk menjamin validitas dan akurasi data. Pelaksanaan berdasarkan tahapan yang jelas dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan oleh BKPM, Pemda dan Investor. Hal ini terbukti dalam 3 bulan setelah kegiatan PPI, 9 Proyek PPI telah diminati investor, sebagaimana ditegaskan oleh Koordinator kegiatan PPI, sebagai berikut:

- Hotel Bintang 4 Resort dan Convention Center, Bangka, Kep Babel, Rp 307,32 M (investor dalam negeri);
- Resort The Dehegila, Pulau Morotai, Maluku Utara, Rp 127,44 M (investor dalam negeri);
- Eco Luxury Hotel Bintang, KEK Tj Lesung, Pandeglang, Banten, Rp 1,75 Trn (investor dalam negeri);
- Industri pengolahan kelapa terintegrasi, Gorontalo, Rp 643,83 M (investor luar negeri);
- Terminal dan Regasifikasi LNG di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Rp 1,62 Trn (investor dalam negeri);
- Industri ekstrusi aluminium di KI Kuala Tanjung, Batu Bara, Sumatera Utara, Rp 3,86 Trn (investor luar negeri);

- g) Industri Mono Ethylene Glycol (MEG) di KI Tj Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan, Rp 19,51 Trn (investor dalam negeri);
- h) Perkebunan Pala terintegrasi dgn industri pengolahan hasil perkebunan, Fak-fak, Papua Barat, Rp 1,84 Trn (investor luar negeri);
- i) Industri Soda ash berbasis hilirisasi garam, Sumenep, Jawa Timur, Rp 3,08 Trn (investor dalam dan luar negeri). *Sumber: Wawancara diolah*

Data tersebut menegaskan kejelasan strategi pencapaian tujuan dan efektivitasnya terbukti dengan telah diminatinya daftar PPI pada 3 (tiga) bulan sejak hasil PPI diluncurkan kepada investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Optimisme perekonomian Indonesia tahun 2022 dan berlanjut pada tahun 2023 diharapkan seluruh proyek diminati oleh investor.

Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap

Perumusan kebijakan PPI dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan proyek-proyek Pemerintah, yakni didasari oleh latar belakang kepentingan Nasional dengan tujuan dan output yang jelas. Menteri Investasi/Ka.BKPM mengukuhkan maksud dan tujuan dari PPI ini diantaranya adalah:

“maksud kegiatan PPI adalah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 5,4-6,0 persen per tahun; untuk peningkatan dan percepatan investasisemakin krusial dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemik Covid-19; memenuhi target pertumbuhan industri pengolahan non migas rata-rata 6,2-6,5% pada tahun 2020-2024. Sedangkan diantara tujuannya adalah untuk memberikan gambaran komprehensif dan mendetail (prastudi kelayakan) kepada investor dan stakeholder mengenai kelayakan suatu proyek; Menganalisis kelayakan investasi suatu proyek di sektor pengembangan kawasan, industri yang terintegrasi dengan kawasan, infrastruktur penunjang kawasan dan sektor pariwisata yang akan didorong dan dikembangkan oleh Pemerintah 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhitungkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif setiap daerah (provinsi) dalam rangkamendukung upaya pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah yang berdayasaing; dan Merumuskan usulan tindak lanjut, strategi, rekomendasi program dan kebijakan, serta insentif khusus kepada

Kementerian/Lembaga terkait bagi pengembangan penanaman modal proyek prioritas strategis sektor pengembangan kawasan, industri yang terintegrasi dengan kawasan, infrastruktur penunjang kawasan dan sektor pariwisata di Indonesia”. *Sumber: Wawancara diolah*

Gambaran tentang analisis kebijakan yang mantap juga diakui oleh Ketua Kadinda Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung (Babel), Thomas Jusman bahwa PPI mendasarkan potensi utama yang ada disetiap lokasi proyek, seperti di Babel yang sangat berpotensi disektor pariwisata. Selanjutnya disampaikan dengan fasilitasi PPI ini, menimbulkan minat Pengusaha untuk menanamkan modalnya sesuai dengan minat dan *passion* (hasrat) Pengusaha. Disamping itu PPI juga merupakan jaminan kelancaran realisasi investasi karena dalam perumusannya telah melibatkan seluruh unsur terkait dari Pusat, daerah dan Masyarakat.

Bukti lain adalah tercapainya target realisasi investasi di Indonesia tahun 2021 yakni sebesar 901.2 trilyun atau 104% dari target RPJMN dan 101 % dari target yang ditetapkan oleh Presiden dengan serapan tenaga kerja sebesar 2,7 juta. (bkpm.go.id).

Perencanaan yang Matang

Kegiatan PPI sebagaimana kelaziman proyek-proyek Pemerintah harus memenuhi beberapa ketentuan, mulai dari kesesuaian kegiatan dengan Nawacita Presiden Jokowi, masuk dalam proyek Prioritas Nasional, dan lain sebagainya.

Proses perencanaan PPI tidak hanya dibahas di internal Kementerian Investasi/BKPM saja, tapi juga melibatkan Kementerian Bappenas dan Kemeterian Keuangan. Rencana anggaran (RAPBN) ini diajukan oleh Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan hingga menjadi APBN. Proses perencanaan ini sebagaimana dijelaskan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Kementerian Investasi, yakni mulai proses pengusulan kegiatan di Kementerian Investasi untuk disusulkan ke Kementerian Keuangan dan selanjutnya dibahas bersama tripartite (Kemeninves/BKPM, Bappenas dan Kemenkeu) dan pemebahasan bersama DPR RI. Proses perencanaan tersebut merupakan amanah UU.

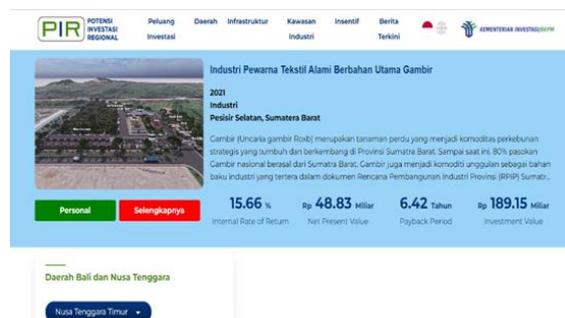
Penyusunan Program yang Tepat

Kegiatan PPI telah memenuhi unsur berdasarkan kriteria yang ditetapkan baik di internal Kemeninves/BKPM, Bappenas dan Kemenkeu serta lolos dalam pembahasan bersama DPR RI. Sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka output PPI dapat memberikan informasi yang lengkap, valid dan akurat sebagaimana dibutuhkan oleh para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

Informasi tersebut membuktikan kesungguhan bangsa Indonesia baik Pemerintah dari pusat hingga Daerah maupun masyarakat. PPI salah satunya dimaksudkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 5,4-6,0 persen per tahun, maka program PPI sangat tepat. Output PPI yang berisi informasi kelayakan usaha, besaran biaya yang dibutuhkan hingga balik modal serta estimasi keuntungan yang didapat dengan penghitungan yang detail, maka program PPI dapat menjadi promosi yang solutif bagi Investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

Tersedianya Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi daya Tarik tersendiri bagi setiap negara dan menjadi pertimbangan Investor dalam menanamkan modal. Kementerian Investasi dalam menyediakan sarana dan prasarana sebagai tindak lanjut dari program PPI adalah dengan menyediakan fasilitas “sistem potensi investasi regional (PIR). Tampilan sistem PIR, sebagaimana dapat diakses di <https://regionalinvestment.bkpm.go.id/pir>



Gambar 5. Sistem Potensi Investasi Regional

Sumber: bkpm.go.id

Fasilitas sistem “pir” ini berisi peluang/potensi investasi yang berbasis di Daerah dengan kelengkapan informasi dari letak, jaminan perizinan, potensi bidang usaha, besaran modal, estimasi balik modal dan

estimasi keuntungan. Pengusaha dapat mengakses “pir” dan dapat menyampaikan minatnya kepada BKPM untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas lainnya hingga realisasi investasi dan pelaksanaan kegiatan bisnis sesuai fasilitas yang disediakan. Keberadaan sistem pir mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, seperti tampak pada laman pir berikut ini:



Gambar 6. Sistem Potensi Investasi Regional

Sumber: bkpm.go.id

Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang bersifat Mendidik

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik merupakan tekad bersama bangsa Indonesia untuk mencegah dan memberantas praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pengawasan dikaitkan dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan Kementerian melalui kegiatan monitoring dan evaluasi baik secara berkala maupun incidental. Adapun pengendalian adalah kegiatan korektif atas temuan monev yang tidak sesuai dengan perencanaan. Aktivitas ini dilaksanakan oleh semua jajaran disetiap jenjang dengan koordinasi melalui Inspektorat. Kegiatan ini semata-mata untuk menjamin akuntabilitas setiap kegiatan di Kemeninves, termasuk penyediaan sarana pengaduan baik secara langsung maupun melalui sistem “LAPOR”, penyediaan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG), Sertifikasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

PENUTUP

Efektivitas Program Penyusunan Peta Peluang Investasi (PPI) Dalam Mendukung Pencapaian Realisasi Investasi di Indonesia: Studi di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menunjukkan hasil yang baik. Bukti efektivitas PPI adalah realisasi

investasi di Indonesia pada tahun 2021 melampaui target

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M. Khoirul, 2018, *Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia*, Laporan Penelitian Hibah UMJ 2018

Anwar, M. Khoirul, 2018, *Kepatuhan Kecamatan pada Standar Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan*, Laporan Penelitian Hibah FISIP UMJ.

Anwar, M. Khoirul. 2016. *Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Model Mewujudkan Pelayanan Prima di Indonesia*. Jurnal Swatantra Edisi.

Anwar, Muhammad Khoirul dan Satrya Nugraha. 2011. *Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Bukan Mimpi*. Surabaya: Narotama University Press

Davis, Keih, dan John Anewstro. 1996. *Perilaku Dalam Organisasi*. edisi ketujuh. Jakarta: Erlangga

Gibson, Ivancevich. Donnelly. 1996. *Organisasi Jilid 1 & 2* Edisi Kedelapan. Editor Saputra, Lyndon Jakarta: Binapura Aksara

PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82994/pp-no-24-tahun-2018>

PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>

PP Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161836/pp-no-6-tahun-2021>